

# PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No. 133 | Tahun XXXV | April-Juni 2018

**Meramu Jurus  
Penyelesaian  
Sengketa  
Perbankan**

**Hariyono Tjahjarijadi:  
Menebar Hal Positif  
dan Optimisme**

**Terus Tumbuh  
dan Berdaya Tahan**



**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional  
(Perbanas)

**PELINDUNG**

Badan Pengurus Perbanas

**PEMIMPIN REDAKSI**

Danny Hartono,  
Sekretaris Jenderal Perbanas

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**

Rita Mirasari,  
Ketua Bidang Humas Perbanas

**REDAKTUR PELAKSANA**

Achmad Friscantono

**SIRKULASI**

Wara Sri Indriani  
Adrian Burhan

**KONSULTAN**

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

**TARIF IKLAN****Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

**Isi**

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

*Probank* menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**

Griya Perbanas Lantai 1  
Jalan Perbanas, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940  
Telepon: (021) 5255731, 5223038  
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: [www.perbanas.org](http://www.perbanas.org)  
e-mail: [sekretariat@perbanas.org](mailto:sekretariat@perbanas.org)

IZIN PENERBITAN KHUSUS  
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/  
STT/1993,  
2 September 1993  
ISSN: 0854-4174

## Memacu Pertumbuhan di Tengah Depresiasi

**P**ertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa bergerak cepat. Hingga triwulan pertama 2018, pertumbuhan ekonomi negeri ini tercatat baru mencapai 5,06%. Capaian ini jauh dari ekspektasi sebagian pengamat dan pelaku usaha, yakni sebesar 5,18%. Namun, capaian tersebut masih lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2017 yang tercatat 5,01%.

Salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi adalah konsumsi rumah tangga. Sepanjang empat triwulan sebelumnya, angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga memang masih di bawah 5%.

Pada triwulan pertama 2018 kredit perbankan nasional pun tampak belum terlalu menggeliat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan kredit perbankan pada Maret 2018 tercatat 8,54% secara tahunan (*year on year/yo*y).

Berdasarkan hasil survei perbankan yang dirilis BI, pertumbuhan kredit diprediksi akan lebih kencang pada semester kedua 2018. Dari hasil survei tersebut, responden optimistis pertumbuhan kredit masih bisa berada di angka 11,7%. Keyakinan itu didukung oleh kondisi ekonomi pada 2018 yang diprediksi lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal senada diungkapkan OJK. Otoritas ini optimistis pertumbuhan kredit perbankan nasional bisa mencapai angka 12% pada 2018 atau sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) yang dibuat para pelaku industri.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan kredit antara lain pertumbuhan ekonomi secara makro yang mulai berjalan stabil. Terutama, dari sisi perkembangan ekonomi global, yakni persaingan dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Dengan demikian, perkembangan aktivitas ekspor impor bakal meningkat dan dapat memacu pertumbuhan kredit perbankan.

Di tengah upaya mendorong pertumbuhan kredit perbankan, para pelaku industri perbankan dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pelemahan yang terus terjadi belakangan ini harus menjadi “peringatan dini” bagi pelaku industri perbankan.

Walau kajian *stress test* yang dilakukan OJK menginformasikan bahwa daya tahan perbankan cukup kuat—hingga Rp20.000,00 per US\$1 sekalipun—hal itu mesti tetap diwaspadai. Terutama terkait dengan kemampuan bayar para debitur yang terekspos dolar AS, seperti debitur yang merupakan importir.

Jika pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, hal itu akan berdampak pada debitur, yang ujung-ujungnya akan mengganggu angsuran debitur tersebut kepada bank. Bila itu terus berlanjut, dikhawatirkan akan meningkatkan rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*), terutama untuk kredit valuta asing (valas). ■





**Dari Redaksi** ..... 1

**Perbanas Utama**

**Terus Tumbuh dan Berdaya Tahan** .....3  
 Perekonomian nasional sepanjang 2018 masih memiliki sejumlah tantangan walau diproyeksikan akan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Sejumlah pelaku usaha di sektor perbankan optimistis pertumbuhan bisnis bank akan lebih baik dan sesuai dengan yang ditargetkan.



**Strategi Jitu Raih Pertumbuhan** .....6

**Masih Ada Ruang untuk Terus Meningkat** .....8  
 Pertumbuhan kredit pada triwulan pertama 2018 melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil survei, pertumbuhan kredit perbankan diprediksi membaik pada triwulan kedua 2018.

**Profil**

**Hariyono Tjahjarijadi**  
 Direktur Utama Bank Mayapada,  
 Anggota Bidang Luar Negeri Perbanas

**Menebar Hal Positif dan Optimisme** .....9



**Aktualita**

**Meramu Jurus Penyelesaian Sengketa Perbankan** .....12

**Masa Depan Sistem Pembayaran Indonesia** ..... 14

**Liputan Khusus**

**Tantangan dan Harapan pada Gubernur BI Baru** .....16  
 Pemimpin baru idealnya menghadirkan harapan baru, di samping melanjutkan prestasi yang sudah dicapai pendahulunya. Lantas, bagaimana harapan pelaku industri perbankan terhadap sosok Gubernur BI yang baru?



**Optimisme Bankir terhadap Perry Warjiyo** .....18  
 BI mempunyai nakhoda baru. Hampir tidak ada kalangan bankir yang memberikan komentar negatif terhadap pengangkatan pejabat karier BI, Perry Warjiyo, sebagai Gubernur BI.

**Regulasi**

**Upaya Mendorong Akselerasi Perbankan** .....19

**Sekilas Berita**

**Baksos Menyambut Idulfitri** .....20  
**Annual Bankers Gathering 2018** .....21  
**Agar Sengketa Selesai Lebih Cepat, Efisien, dan Biaya Terukur** .....22  
**ABA - COFITT Sustainable Finance Seminar** .....23  
**FGD Analisis Permintaan Kredit** .....24  
**Rapat Umum Anggota Tahunan LAPSPI 2017** .....24

**Suplemen**

**Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Bank Mestika** .....20

# Terus Tumbuh dan Berdaya Tahan



Perekonomian nasional sepanjang 2018 masih memiliki sejumlah tantangan walau diproyeksikan akan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Sejumlah pelaku usaha di sektor perbankan optimistis pertumbuhan bisnis bank akan lebih baik dan sesuai dengan yang ditargetkan.

**O**toritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit industri perbankan nasional hingga Maret 2018 mencapai 8,54% secara tahunan (*year on year/yoy*). Pertumbuhan kredit pada Maret tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2018 yang tumbuh 8,2% (*yoy*).

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, menjelaskan bahwa intermediasi sektor jasa keuangan pada Maret 2018 masih berada di level moderat. “Di lain sisi, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7,66% (*yoy*). Saat ini OJK memantau dinamika perekonomian global dan dampaknya ke stabilitas sistem keuangan nasional,” jelasnya.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan, kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) bank berada di level terkendali, dengan rasio *NPL gross* sebesar 2,75%. Tingkat permodalan perbankan (*capital adequacy ratio/CAR*) juga masih terkendali, di level 22,67%.

Sementara itu, menurut BI seperti dikutip dari laman resminya, suku bunga kredit dan simpanan berjangka kembali turun, sejalan dengan berlanjutnya transmisi penurunan suku bunga kebijakan BI. Pada Maret 2018 rata-rata tertimbang suku bunga kredit perbankan 11,18% atau turun 9 *basis points (bps)* dari bulan sebelumnya. Untuk suku bunga simpanan berjangka dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan pada Maret 2018 masing-masing tercatat 5,88%, 6,29%, dan 6,46%, atau menurun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang 5,97%, 6,40%, dan 6,56%.

Menurut BI, penyaluran kredit perbankan pada Maret 2018 telah menahan perlambatan pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2). Posisi M2 tercatat Rp5.394,9 triliun pada Maret 2018 atau tumbuh 7,5% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 8,3% (*yoy*).

Perlambatan pertumbuhan M2 terjadi pada seluruh komponen uang beredar. Komponen uang kuasi tercatat tumbuh 6,2% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,7% (yoy). Sementara, komponen M1 (uang beredar dalam arti sempit) tercatat tumbuh 11,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 13% (yoy). Komponen lainnya berupa surat berharga selain saham juga tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan.

Berdasarkan faktor yang memengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh operasi keuangan pemerintah dan aktiva luar negeri bersih. Pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusat tercatat 5,9% (yoy) pada Maret 2018, turun dari 10,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh peningkatan simpanan pemerintah pusat terkait dengan akhir periode laporan pajak dan penerimaan dari penerbitan sukuk global. Di lain sisi, aktiva luar negeri bersih pada Maret 2018 juga tumbuh sebesar 9,3% (yoy), atau

lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 13,6% (yoy).

Melihat situasi dan kondisi ke depan, BI menilai, transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial melalui jalur suku bunga masih akan terus berlangsung. Hal ini sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter BI yang sudah dilakukan. Hingga saat ini, kondisi sistem keuangan dinilai tetap stabil, sejalan dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Ke depan, Bank Sentral tetap fokus menjaga stabilitas perekonomian yang menjadi landasan utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kendati demikian, sejumlah risiko yang bersumber dari eksternal tetap perlu diwaspadai. "Seperti peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan kecenderungan penerapan *inward-oriented trade policy* di sejumlah negara maupun dari dalam negeri terkait dengan inflasi," jelas Deputi

## Stress Test Semestinya Tidak Dipublikasikan

Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013-2018, Agus D.W. Martowardojo, menegaskan, *stress test* terhadap perbankan di tengah pelemahan rupiah yang mendekati level Rp14.000,00 per satu dolar AS (US\$1) seharusnya tidak dipublikasikan ke masyarakat. Pernyataan ini menyikapi OJK yang sudah melakukan *stress test* terhadap perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia masih cukup kuat, meski dolar AS tembus Rp20.000,00 per US\$1.

Penegasan Agus Marto untuk tidak memublikasikan *stress test* terhadap perbankan di tengah pelemahan rupiah tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya kekhawatiran sentimen pasar. Para ekonom juga menilai, pernyataan OJK bisa menggiring sentimen pasar terhadap rupiah.

Padahal, jika rupiah benar-benar menyentuh Rp20.000,00 per US\$1, dikhawatirkan akan memicu peningkatan kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) bank. Merosotnya nilai tukar rupiah secara langsung akan berdampak ke penyaluran kredit bank dan risiko kredit bermasalah.

Efek terberatnya ialah kondisi debitur yang tidak hanya tertekan oleh merosotnya rupiah secara langsung. Namun, permintaan terhadap barang juga akan merosot karena harga-harga juga akan meningkat. Kelesuan permintaan akan meningkat akibat merosotnya nilai tukar rupiah. Rupiah yang anjlok tentu menurunkan permintaan

terhadap barang karena semua harga barang impor mengacu pada dolar AS.

Contoh paling sederhana, harga mobil dan sepeda motor serta *handphone* dan tentu barang-barang impor lainnya. Efeknya, pembiayaan konsumen juga akan tertekan yang pada akhirnya bank juga akan terkena imbasnya lantaran selama ini pembiayaan berasal dari bank. Selain itu, debitur di industri pengolahan akan terkena dampak dari nilai tukar rupiah yang terus tertekan.

Menurut ekonom Indef, Bhima Yudistira, akan banyak debitur bank yang terdampak pelemahan rupiah, terutama yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku dan barang modal impor. Tentu imbasnya akan ada peningkatan biaya produksi.

Ditambah lagi, posisi tingkat risiko kredit atau *credit at risk* yang masih cukup tinggi berada di kisaran 11%. Kredit kualitas rendah akan meningkat karena melihat posisi *credit at risk* yang masih tinggi. Bahkan, swasta yang memiliki utang luar negeri juga terancam gagal bayar, jika rupiah melemah hingga level Rp20.000,00 per US\$1.

Pernyataan OJK ini, kata Bhima, bisa mengarahkan sentimen pasar terhadap dolar AS ke level Rp20.000,00. Hal ini pernah dialami saat lembaga *rating* Standard and Poor's (S&P) menyatakan bahwa asumsi rupiah bisa menembus Rp15.000,00 per US\$1. Investor kemudian melakukan antisipasi dengan memborong dolar dan jual rupiah sebelum harganya mencapai Rp15.000,00 per US\$1. "Meskipun itu hanya *stress test* atau uji ketahanan sistem perbankan, namun dampak psikologisnya memengaruhi perilaku masyarakat, pengusaha, dan spekulasi," tutupnya. ■



**Agus Martowardojo;**  
menghindari kekhawatiran



Gubernur BI, Dody Budi Waluyo.

Untuk itu, BI terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, khususnya dengan memitigasi peningkatan risiko jangka pendek. “Bank Indonesia juga makin memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan serta penguatan pelaksanaan reformasi struktural,” ujarnya.

Terkait dengan tingkat risiko, BI memproyeksikan risiko kredit akan menurun pada tahun ini. Hal itu sejalan dengan prospek menguatnya permintaan kredit.

Agus D.W. Martowardojo (biasa dipanggil Agus Marto), Gubernur BI periode 2013-2018, mengatakan, akan meningkatkan permintaan kredit pada tahun ini seiring dengan konsolidasi korporasi yang mulai berakhir. “Ini mendorong permintaan kredit,” terangnya.

Pada tahun ini permintaan kredit dan DPK akan membaik seiring dengan prospek perbaikan ekonomi domestik. Kredit tahun ini diperkirakan tumbuh 10%-12% dan DPK tumbuh 9%-11%.

Sejalan dengan meningkatnya fungsi intermediasi bank, BI memperkirakan ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Hal ini ditopang oleh kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit yang cukup baik. Pada akhirnya ini akan berkontribusi pada terjaganya rentabilitas dan ketahanan permodalan. Tahun ini likuiditas perbankan diperkirakan membaik, dipengaruhi oleh operasi keuangan pemerintah yang cukup besar.

### Simpanan di Bank Umum Tumbuh 0,88%

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data mengenai pertumbuhan jumlah rekening dan nominal simpanan pada bank umum per Maret 2018. Tercatat total simpanan di bank umum per Maret 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,88% (*month on month/mom*), dari Rp5.334 triliun pada Februari 2018 menjadi Rp5.381 triliun per Maret 2018.

“Total rekening simpanan per Maret mencapai 252.591.551 rekening. Jumlah ini mengalami kenaikan 1.725.333 rekening atau 0,69% (*mom*) dibandingkan dengan posisi jumlah rekening per Februari 2018, yang sebanyak 250.866.218 rekening,” jelas Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho, dalam keterangan resmi yang dirilis.

Ia menambahkan, hingga posisi akhir Maret 2018, untuk simpanan dengan nilai saldo sampai dengan Rp2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat sebesar 0,69% (*mom*), yakni dari 250.615.670 rekening per Februari 2018 menjadi 252.341.846 rekening per Maret 2018. Sementara itu, jumlah nominal simpanannya sedikit turun sebesar 0,11%, dari posisi

### Kinerja Bank Umum 2016 - 2018 (Rp Miliar)

Keterangan	2016	2017	P (%)	Maret 2017	Maret 2018	P (%)
Aset Total	6.729.799	7.387.634	9,77	6.829.581	7.429.891	8,79
Kredit yang Diberikan	4.413.414	4.781.931	8,35	4.402.975	4.788.783	8,76
Dana Pihak Ketiga	4.836.758	4.289.377	-11,32	4.916.665	5.293.098	7,66
Laba Setelah Pajak	106.544	131.171	23,11	32.882	36.390	10,67
<b>Rasio Keuangan (%) *)</b>						
CAR	22,93	23,18		22,88	22,65	
ROA	2,23	2,45		2,50	2,55	
BO/PO	82,22	78,64		80,15	78,76	
NIM	5,63	5,32		5,38	5,07	
LDR	90,70	90,04		89,12	90,19	

Keterangan:

- \*) : bank umum konvensional;

- ROA : return on asset;

- NIM : net interest margin;

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.

- P : pertumbuhan;

- BO/PO : biaya operasional terhadap pendapatan operasional;

- LDR : loan to deposit ratio.

- CAR : capital adequacy ratio;

akhir Februari 2018 sebesar Rp2.309 triliun menjadi Rp2.307 triliun pada posisi akhir Maret 2018.

Untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar, jumlah rekeningnya turun sebesar 0,34%, yakni dari 250.548 rekening pada Februari 2018 menjadi 249.705 rekening pada Maret 2018. Sementara, untuk jumlah nominal simpanannya naik sebesar 1,63%, yakni dari Rp3.024 triliun pada Februari 2018 menjadi Rp3.074 triliun hingga posisi Maret 2018.

Dilihat dari jenis simpanan, jenis simpanan yang jumlah rekeningnya mengalami kenaikan paling tinggi ialah deposito. Kenaikannya mencapai 0,91%, dari 4.051.331 rekening pada Februari 2018 menjadi 4.088.357 rekening pada Maret 2018.

Untuk deposit *on call* juga mengalami kenaikan nominal tertinggi dibandingkan dengan jenis simpanan lain. Kenaikannya sebesar 36,64%, dari Rp63,58 triliun pada Februari 2018 menjadi Rp86,88 triliun pada Maret 2018.

Pada Maret 2018, untuk jumlah rekening dan nominal simpanan dalam rupiah meningkat. Sedangkan untuk valuta asing (valas), jumlah rekeningnya menurun, tapi jumlah nominalnya meningkat.

Jumlah rekening simpanan dalam rupiah meningkat 0,69% (*mom*), dari Februari 2018 sebanyak 249.858.135 rekening menjadi 251.586.343 rekening per akhir Maret 2018. Sementara, untuk jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam valas menurun 0,29%, dari Februari 2018 sebanyak 1.008.083 rekening menjadi 1.005.208 rekening pada Maret 2018.

Dilihat dari nominalnya, simpanan dalam rupiah naik 0,97% secara bulanan, dari Rp4.599 triliun pada Februari 2018 menjadi Rp4.644 triliun pada Maret 2018. Untuk simpanan dalam valas, jumlahnya meningkat 0,28% (*mom*), dari Rp735 triliun pada Februari 2018 menjadi Rp737 triliun pada Maret 2018.

Sebagai informasi, bank umum peserta penjaminan per Februari 2018 berjumlah 115 bank, yang meliputi 102 bank umum konvensional dan 13 bank umum syariah. Bank umum konvensional, terdiri atas 4 bank pemerintah, 25 bank pemerintah daerah, 64 bank umum swasta nasional, dan 9 kantor cabang bank asing. ■

# Strategi Jitu Raih Pertumbuhan

Perekonomian Indonesia pada 2018 diproyeksikan akan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Sejumlah bank menjalankan strategi jitu untuk mencapai kinerja positif sepanjang tahun.

**W**alaupun masih dinilai lambat pergerakannya, penyaluran kredit perbankan nasional sepanjang kuartal/triwulan pertama 2018 masih lebih baik dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Sejumlah bank pun meyakini pencapaian bisnisnya masih sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Untuk mencapai pertumbuhan dan kinerja positif selama 2018, sejumlah bank telah membuat perencanaan matang dalam rencana bisnis bank (RBB) dan akan menjalankan berbagai strategi jitu. Tentunya disesuaikan dengan skala bisnis dan segmentasi yang dimiliki tiap bank. Berikut ini informasi mengenai kinerja sejumlah bank selama kuartal pertama 2018 dan strateginya mencapai target bisnis.

**Tigor M. Siahaan,**  
Presiden Direktur CIMB Niaga

## Fokus UKM dan KPR

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menyalurkan kredit sebesar Rp179,1 triliun per 31 Maret 2018. Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor M. Siahaan, menjelaskan, dari total penyaluran kredit tersebut, kredit konsumen tercatat sebesar Rp48,1 triliun (27%) dan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp35,1 triliun (20%). *Wholesale banking* proporsinya terbesar dari kredit yang disalurkan, yakni kredit korporasi sebesar Rp65,2 triliun (36%) dan kredit komersial sebesar Rp30,7 triliun (17%).

“Strategi yang kami ambil untuk fokus pada kredit pemilikan rumah maupun segmen UKM terus menampilkan hasil, dengan angka pertumbuhan masing-masing 9,9% dan 5,3% secara *year on year* (yoy), sementara kredit korporasi dan komersial tumbuh masing-masing 7,3% dan 4,9%. Total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp191,5 triliun per 31 Maret 2018, didorong oleh pertumbuhan *current account saving account* (CASA) sebesar 7,4%,” jelas Tigor dalam keterangan pers yang dirilis perusahaan.

Untuk menggarap segmen *millennial*, CIMB Niaga bekerja sama dengan PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT JCB International Indonesia meluncurkan CIMB Niaga Indosat Ooredoo Card. Dengan JCB sebagai prinsipal, kartu kredit platinum yang baru ini diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan nasabah sekaligus membuat transaksi sehari-hari menjadi lebih cepat, sederhana, nyaman, serta memberikan solusi keuangan.

Untuk segmen perbankan syariah, total pembiayaan unit usaha syariah CIMB Niaga (CIMB Niaga Syariah) mencapai Rp17,4 triliun atau tumbuh 58,5% (yoy) dengan DPK sebesar



Rp17,6 triliun atau tumbuh 80,8% (yoy) per 31 Maret 2018. Bisnis syariah terus mendapatkan momentum yang positif dengan kontribusi sebesar 9,7% terhadap total pembiayaan CIMB Niaga, meningkat dari 6,2% pada tahun sebelumnya.

Pada kuartal pertama 2018 CIMB Niaga mampu membukukan laba sebesar Rp877 miliar atau meningkat sebesar 37,0%

dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba bersih tersebut didukung oleh pendapatan nonbunga sebesar 38,5% menjadi Rp992 miliar serta penurunan biaya pencadangan sebesar 21,2% (yoy).

“Kami membukukan kinerja positif pada kuartal pertama 2018 seiring dengan kondisi makro-ekonomi yang menunjukkan perbaikan secara perlahan. Pendapatan operasional naik 5,6% menjadi Rp4,0 triliun, sedangkan biaya meningkat 4,4% menjadi Rp2,0 triliun. Perbaikan progresif yang kami lakukan terkait dengan pengelolaan kualitas aset berhasil menurunkan biaya pencadangan sebesar 21,2%. Hasilnya, laba bersih tumbuh 37,0% menjadi Rp877 miliar pada kuartal pertama,” terang Tigor.

Sementara itu, total aset yang dibukukan pada kuartal pertama 2018 mencapai Rp257,5 triliun, naik sebesar 8,7% (yoy). Di lain sisi, *capital adequacy ratio* (CAR) tercatat sebesar 19,13% untuk posisi 31 Maret 2018. Ke depan, CIMB Niaga akan terus fokus pada aktivitas *cross selling* untuk mendorong pendapatan nonbunga serta mengoptimalkan CASA melalui digitalisasi perbankan konsumen dan UKM.

Suprajarto,  
Direktur Utama BRI

## Tumbuh di Atas Pertumbuhan Industri

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) pada kuartal pertama 2018 menyalurkan kredit sebesar Rp757,68 triliun atau naik sebesar 11,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp681,27 triliun.

“Kami bersyukur pencapaian tersebut di atas tingkat pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2018 yang tercatat sebesar 8,5%,” jelas Direktur Utama Bank BRI, Suprajarto.

Ia menambahkan, BRI mampu meningkatkan portofolio pembiayaan ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penyaluran kredit ke segmen UMKM tercatat senilai Rp584,7 triliun atau 77,2% dari keseluruhan portofolio kredit BRI. Pada periode yang sama tahun lalu, portofolio penyaluran kredit BRI ke segmen UMKM tercatat 74,4%. “Ini merupakan bukti nyata komitmen BRI untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia sehingga meningkatkan sektor riil,” ujarnya.

BRI berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp22,3 triliun kepada lebih dari 1,1 juta debitur pada kuartal pertama 2018. Pencapaian ini setara dengan 28,1%

dari target penyaluran KUR yang ditargetkan pemerintah kepada BRI selama 2018, yakni sebesar Rp79,7 triliun.

Penyaluran kredit yang tumbuh dua digit diimbangi BRI dengan tetap menjaga kualitas kredit. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah (*NPL*) yang sebesar 2,46%. *NPL* BRI lebih kecil daripada industri. *NPL* industri perbankan di Indonesia 2,75% pada Maret 2018.

Pada kuartal pertama 2018 BRI mampu membukukan laba bersih sebesar Rp7,42 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,4%. Kenaikan laba bersih ini didorong oleh *fee based income* yang terus tumbuh. Pada kuartal pertama 2018 BRI mampu meraup *fee based income* senilai Rp4,98 triliun atau naik 23,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan kinerja yang cukup kuat tersebut, kami optimistis mampu tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap fokus terhadap pemberdayaan UMKM,” tegas Suprajarto.



Eko Rachmansyah Gindo,  
Direktur Utama Bank Bukopin

## Laba Bersih Tumbuh 10%

Sepanjang kuartal pertama 2018 PT Bank Bukopin Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp126,7 miliar. Labanya ini mengalami peningkatan sekitar 10% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp115,6 miliar.

Direktur Utama Bank Bukopin, Eko Rachmansyah Gindo, menjelaskan, kinerja dan operasional Bank Bukopin saat ini berada dalam kondisi yang kuat dan tetap tumbuh berkelanjutan. Menurutnya, laba bersih Bank Bukopin akan tumbuh sesuai dengan target yang ditetapkan perseroan pada 2018.

“Hingga kuartal pertama 2018 laba sebelum pencadangan mencapai Rp295,7 miliar (atau) tumbuh 28,6% dan laba bersih sebesar Rp126,7 miliar. Pencapaian itu menunjukkan bahwa kinerja perseroan hingga saat ini tumbuh *on the track*,” ujarnya dalam siaran pers yang dirilis perusahaan.

Bank Bukopin juga membukukan pencadangan sebesar Rp155 miliar dan berhasil menurunkan rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*). Rasio *NPL (net)* per 31 Maret 2018 mencapai 4,47%, membaik dari sebelumnya 6,37% pada posisi 31 Desember 2017.

Posisi likuiditas bank ini juga terjaga dan sehat. Hal itu terlihat dari *loan to deposit ratio (LDR)* yang berada pada

kisaran 79% dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp90,1 triliun. Total aset juga naik Rp1,3 triliun menjadi Rp107,7 triliun hingga akhir Maret 2018.

Menurut Eko, saat ini Bank Bukopin terus melakukan konsolidasi internal yang difokuskan pada pengembangan bisnis berbasis aktiva tertimbang menurut risiko (*ATMR*) rendah, penghimpunan sumber dana murah, peningkatan *fee based income*, perbaikan efisiensi operasional, dan percepatan peningkatan kualitas kredit, serta penjualan agunan yang diambil alih.

Untuk jangka panjang, Bank Bukopin telah menyiapkan bisnis masa depan melalui bisnis *start up* dan aliansi *financial technology (fintech)* serta menjangkau nasabah baru dari generasi *millennial* dengan penerapan *core banking system* berbasis digital. Di samping itu, perseroan terus meningkatkan kualitas manajemen risiko, *compliance*, dan pengendalian internal yang lebih kuat.





# Masih Ada Ruang untuk Terus Meningkatkan

Pertumbuhan kredit pada triwulan pertama 2018 melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil survei, pertumbuhan kredit perbankan diprediksi membaik pada triwulan kedua 2018.

Hasil survei perbankan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pertumbuhan kredit pada triwulan pertama 2018 melambat secara *quarter to quarter (qtq)*. Hal itu tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) permintaan kredit baru pada triwulan pertama 2018 yang sebesar 75,9% atau lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tercatat 94,3%.

Melambatnya pertumbuhan kredit terjadi pada semua jenis kredit. Pada triwulan pertama 2018 SBT kredit modal kerja menurun dari 84,3% menjadi 71,9%, SBT kredit investasi menurun dari 84,2% menjadi 73,5%, dan SBT kredit konsumsi menurun dari 35% ke 16,6%. Melambatnya pertumbuhan kredit konsumsi terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan kartu kredit, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Menurunnya KKB sejalan dengan menurunnya penjualan kendaraan bermotor.

Namun, pada triwulan kedua 2018 pertumbuhan kredit baru diperkirakan akan meningkat. Hal itu tercermin dari SBT permintaan kredit baru pada triwulan kedua 2018 yang sebesar 93,1% atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 74,8%. Menguatnya pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan terus menguat, penurunan suku bunga kredit, dan penurunan risiko penyaluran kredit.

Tak hanya kredit, dana pihak ketiga (DPK) pun diprediksi akan mencatatkan pertumbuhan. Hal itu tercermin dari SBT triwulan kedua 2018 yang sebesar 89,2% atau lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang tercatat 60%. Menguatnya pertumbuhan DPK terjadi pada deposito dan tabungan, sementara pertumbuhan giro diperkirakan melambat.

Sampai dengan akhir tahun, responden optimistis pertumbuhan kredit berada di angka 11,7%. Memang, nilai tersebut lebih rendah daripada perkiraan sebelumnya yang sebesar 11,8%, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi



Heru Kristiyana; 2018 sudah lebih baik

2017 yang tercatat 8,2% (*year on year/ yoy*).

Hasil survei perbankan juga mengindikasikan tetap kuatnya optimisme terhadap pertumbuhan kredit pada 2018. Optimisme tersebut didukung oleh perkiraan kondisi ekonomi pada 2018 yang lebih baik ketimbang tahun sebelumnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis pertumbuhan kredit bakal sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB), yakni sebesar 12%. Menurut Kepala Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, salah satu pendorong pertumbuhan kredit adalah mulai stabilnya pertumbuhan ekonomi makro. Terutama, dari sisi perkembangan ekonomi global, yakni persaingan dagang

antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Dengan demikian, perkembangan aktivitas ekspor impor bakal meningkat dan memacu pertumbuhan kredit perbankan.

“Pertumbuhan kredit ini menandakan bahwa perbankan kita sudah mulai menggeliat untuk ikut ajakan pemerintah dalam menyalurkan kredit. Sehingga, kredit tumbuh lebih baik,” ungkapnya.

Kendati pertumbuhan kredit masih satu digit, Heru menambahkan, secara *month to month (mtm)* pada 2018 sudah lebih baik. “Januari dan Februari 2018 secara bulanan sudah tumbuh dibandingkan dengan periode 2017,” katanya.

Jika diperinci berdasarkan kelompok bank, kredit perbankan juga mencatatkan pertumbuhan. Data OJK menunjukkan, pada Februari 2018 kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1 mencatatkan pertumbuhan kredit paling tinggi, yakni sebesar 11,22%. Sedangkan, pertumbuhan kredit terendah dibukukan kelompok BUKU 2, yakni 7,25%. Sementara, kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 masing-masing mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 7,46% dan 8,9% per akhir Februari 2018.

“Semua (kelompok) BUKU masih tumbuh. Memang, secara nominal paling besar pasti BUKU 3 dan 4. Masih ada ruang (kredit) untuk terus tumbuh lagi,” pungkasnya. ■

**Hariyono Tjahjarijadi,**  
Direktur Utama Bank Mayapada,  
Anggota Bidang Luar Negeri Perbanas

# Menebar Hal Positif dan Optimisme

Secara fundamental, perekonomian Indonesia sudah jauh lebih baik. Untuk memaksimalkan peluang yang ada, setiap pelaku usaha dan masyarakat harus memiliki optimisme dan membangun hal positif.

**B**eberapa tahun terakhir, kinerja ekonomi makro Indonesia tumbuh perlahan. Namun, secara fundamental, perekonomian Indonesia sudah lebih kuat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Penguatan ini telah dilakukan segenap pemangku kebijakan terkait, baik fiskal maupun moneter.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih kurang kencang seperti ini, maka pertumbuhan sektor perbankan juga akan sangat berkaitan. Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit perbankan pada kuartal atau triwulan pertama 2018 tumbuh 8,5%.

Pertumbuhan kredit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,2%. Namun, lebih lambat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Ke depan, pelaku bisnis perbankan masih memiliki ruang untuk memacu pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal itu diyakini Hariyono Tjahjarijadi, Direktur Utama Bank Mayapada, yang juga Anggota Bidang Luar Negeri Perbanas. Sebagai bankir dan warga negara, dirinya harus optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi dan harus bisa berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional melalui berbagai kegiatan dan pemikiran yang positif.

Seperti apa dan bagaimana peluang serta tantangan industri perbankan ke depan? Berikut wawancara lengkap Hariyono Tjahjarijadi dengan Majalah *Probank*. Petikannya:



### **Bagaimana kinerja industri perbankan pada kuartal pertama 2018?**

Tahun 2018 hampir mencapai satu semester, tetapi kondisi perekonomian secara makro belum menunjukkan perubahan secara berarti. Perbankan sendiri mengikuti industri pada umumnya sehingga pada waktu krisis, bank merupakan sektor terakhir yang terkena dampak. Begitu juga ketika ekonomi mulai membaik, industri tumbuh terlebih dahulu, baru bank menyusul kemudian. Itu secara bisnis, ya masuknya dalam kredit modal kerja atau investasi.

Sedangkan untuk konsumen, bank bisa melakukan inovasi untuk mempromosikan konsumsi masyarakat. Contohnya, bank bisa menciptakan satu program, dengan bekerja sama dengan *dealer, merchant*, atau *developer*. Sebetulnya, kalau kita lihat uang masyarakat yang ada di bank saat ini terus bertambah dan nominal penambahannya di atas nilai bunga. Itu berarti ada penambahan uang masyarakat yang disetor, masuk, ke sistem perbankan.

Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana dunia usaha bisa tenang berbisnis. Adanya kepastian berusaha tentunya akan membuat pengusaha percaya diri untuk berekspansi. Skenario tersebut tentunya ideal untuk memacu pertumbuhan perbankan. Hanya saja, sekarang ini bagaimana pemerintah, terutama dari sisi fiskal, dapat mewujudkan skenario tersebut.

### **Bagaimana dengan kinerja Bank Mayapada pada kuartal pertama 2018?**

Sampai dengan pertengahan kuartal kedua, pertumbuhan kinerja Bank Mayapada tidak setinggi beberapa kuartal sebelumnya. Jika dilihat persentasenya, kami masih bisa tumbuh dua digit, tapi rendah sekitar 11%-12%. Saya tidak ingin *misleading* dengan menyatakan kinerja kami tumbuh pesat. Biasanya begitu untuk pertumbuhan dua digit karena total nominal *amount* kami hanya Rp50 triliun. Dari nilai tersebut, tentunya pertumbuhan yang dibukukan Bank Mayapada masih jauh dibandingkan dengan bank besar, meskipun persentasenya lebih kurang sama.

Dari sisi permodalan, saat ini kami masuk dalam BUKU 3, total modal sekitar Rp8 triliun-Rp9 triliun. Tahun ini rencananya kami mau menambah modal sebesar Rp2 triliun. Selain itu, ada rencana untuk menerbitkan *subdebt*. Nilainya masih kami hitung. Namun, kami targetkan tahun ini *capital adequacy ratio (CAR)* kami, yang saat ini berada di posisi 13%, naik ke angka 19%-20%. Karena, biar bagaimana pun perlu, ke depan aturan-aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) akan makin banyak sehingga akan memengaruhi modal. Jadi, kami harus memperkuat sisi permodalan.

Kami punya keyakinan, meskipun semester pertama pencapaian kami belum maksimal, kami yakin kami bisa mencapai yang lebih baik. Karena, kalau kami lihat rencana bisnis terdekat kami, yaitu *rights issue*, pemegang saham betul-betul yakin, sudah menyiapkan uang untuk menambahkan modal. Yang saat ini kami sedang hitung, kami mau mengeluarkan *subdebt* berapa. Karena, *subdebt* tujuannya bukan sekadar *peer to capital*, melainkan betul-betul modal jangka panjang.

### **Apa dampak membaiknya ekonomi global bagi Indonesia?**

Ketika ekonomi globalnya membaik, seharusnya ekonomi domestik terbawa. Minimal harga komoditas yang menjadi ekspor kita harganya terbawa naik, seperti batu bara. Hal ini penting karena, menurut saya, industri kita secara umum belum bisa dijadikan ujung tombak perekonomian.

Saya akui ekonomi kita besarnya masih di dua sektor, yakni sektor komoditas dan hasil perkebunan. Karena itu, sektor industri harus terus dikembangkan. Akan tetapi, yang terpenting dari semua itu, ekspor kita harus naik karena cadangan devisa kita sangat tergantung pada ekspor.

Ekspor kita sebetulnya ada, tapi tidak semua devisa masuk kembali atau istilah lainnya "diparkir" di luar negeri. Konotasinya tidak negatif karena dia juga punya kewajiban dalam mata uang asing. Sehingga, daripada terjebak di kurs penukaran mata uang atau tersandera di perbatasan, banyak pengusaha yang memilih untuk memarkir dana tersebut di luar negeri.

Apa pun alasannya, menurut saya, praktik seperti ini harus dihindari. Pada zaman menteri perdagangan dijabat oleh Ibu Marie Elka Pangestu muncul wacana untuk mewajibkan eksportir membawa pulang devisa ke dalam negeri. Pemerintah harusnya mendalami hal ini dan mencari solusi bagaimana pengusaha membawa pulang devisa. Tentunya pemerintah harus meramu peraturan yang memudahkan mereka ketika akan membayar kewajibannya dalam mata uang asing. Jika wacana tersebut terealisasi, dengan dukungan penuh para pengusaha, akan sangat membantu devisa negara.

### **Apakah tantangan perbankan sekarang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya?**

Lebih kurang seperti itu. Memang perlambatan ekonomi global pengaruhnya masih terus terasa. Yang kita tidak tahu Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya. Kemungkinan juga suku bunga acuan kita akan naik.

Yang saya tidak mengerti, kenapa ekonom atau wartawan selalu mengaitkan suku bunga naik dengan turunnya kredit. Saya selalu bilang bahwa kepastian berusaha lebih penting untuk mendorong performa kredit. Zaman dulu, ketika suku bunga 2% sebulan, pertumbuhan kita jauh lebih baik. Hal ini dikarenakan kepastian usahanya lebih jelas dibandingkan dengan saat ini.

### **Biasanya momen politik seperti pilkada memacu konsumsi dalam negeri. Akan tetapi, dua tahun terakhir konsumsinya tidak sebesar sebelumnya. Apakah tahun politik masih signifikan pengaruhnya terhadap industri?**

Sebagaimana perhelatan pilkada sebelumnya, pilkada serentak pada 2018 ini juga akan menjadi penggerak perekonomian mengingat pengeluaran untuk kampanye akan masuk ke sistem keuangan. Pilkada serentak juga meningkatkan konsumsi masyarakat.

Selain itu, BI makin mengetatkan peredaran uang palsu. Seperti yang kita tahu, peredaran uang palsu di politik jumlahnya cukup besar. Apa pun alasan lainnya, yang jelas gaya hidup orang sudah berubah, termasuk dalam politik.

Tapi, walau bagaimana pun, menurut saya, konsumsi di tahun-tahun politik pasti ada peningkatan. Karena, bagaimana



pun konsumsi ini pelumas bagi sistem ekonomi.

**Dengan kondisi tersebut, apakah Anda masih optimistis terhadap capaian perbankan yang akan dibukukan sepanjang 2018?**

Saya sependapat dengan para ekonom dan sebagainya bahwa tahun ini seharusnya lebih baik dibandingkan dengan tahun

lalu. Cuma, kapan. Ini mau semester kedua. Oleh karena itu, saya berharap semester kedua 2018 jauh lebih baik dibandingkan dengan semester pertama. Terlebih lagi bertepatan dengan momen Lebaran dan Asian Games 2018.

Seharusnya kedua momen tersebut menjadi pemicu konsumsi. Seperti kita tahu, konsumsi selalu menjadi lokomotif awal untuk ekonomi berjalan. Mudah-mudahan momentum ini jangan sampai salah atau tidak maksimal.

Tidak hanya faktor dari dalam negeri, di luar negeri juga kondisi ekonomi akan terus membaik. Hanya saja, di luar negeri membaiknya lebih cepat daripada perkiraan sehinggaantisipasi kita meleset. Sebagai contoh bagaimana di Amerika Serikat, suku bunganya naik semua, alhasil mata uangnya menguat terhadap rupiah. Tidak hanya itu, *global bond* yang mereka keluarkan juga nilainya terus menguat di atas 3%.

**Prediksi Anda pada sisa tahun ini?**

Disrupsi akan makin terjadi dan akselerasi akan makin cepat. Ini yang akan dihadapi oleh semua. Perbankan jalan atau jalurnya sudah kelihatan. *Timing*-nya juga cukup tepat. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sudah berjalan. Tidak lama lagi ada *QR Payment* yang bisa mengurangi biaya. Ke depan akan ada *e-wallet* yang akan mengambil peran dari sistem perbankan.



Tidak boleh dilupakan, hal yang sangat penting, BI sudah sepakat sama OJK jika semua sistemnya harus *sharing*. Sehingga, tidak semua bank berbondong-bondong beli alat. Jadi, *cost* bisa ditekan rendah.

Sementara, di dalam bank, otomatis pengetahuan *front liner* harus ditingkatkan karena posisi tersebut cepat atau lambat akan digantikan oleh otomatisasi. Disrupsi seperti ini akan terus berlanjut dan makin lama akan makin cepat. Di sini kualitas manusia di bank harus terus ditingkatkan. Untuk itu, pelatihan *in house training* harus terus ditingkatkan.

**Sebagai Anggota Bidang Luar Negeri Perbanas, bagaimana kontribusi Perbanas di ASEAN?**

Di Perbanas, tugas bidang luar negeri sebagian besar berhubungan dengan asosiasi perbankan Asia Tenggara (ASEAN Bankers Association/ABA). Selain itu, Perbanas terus membina hubungan dengan bank sentral beberapa negara ASEAN.

Dari hubungan ini, kami menggali ilmu, tema atau isu yang sedang hangat di lingkup ASEAN untuk dipelajari. Jika ilmu tersebut dapat memberikan kontribusi positif, tentunya akan diusulkan kepada regulator. Karena itu, kita juga menjaga hubungan baik dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit asosiasi bank di luar negeri yang meminta masukan atau kajian dari Indonesia. ■

## Pentingnya Jiwa Seni

Bagi Hariyono Tjahjarijadi, yang dipercaya sebagai nakhoda Bank Mayapada, jiwa seni bisa menjadi kunci keberhasilan seorang bankir. Seniman banyak dianggap sebagai sosok yang kreatif, imajinatif, dan bebas. Namun, seorang seniman seyogyanya memiliki kemampuan untuk meramu beragam ilmu dan bahan menjadi sebuah karya seni.

“Ringkasnya, bankir harus punya keinginan untuk bisa memahami dan menyatukan segala ilmu yang diperlukan oleh bank. Dia harus mempunyai kemampuan dan *passion* di situ,” kata Hariyono.

Pria yang sudah mengabdikan diri di Bank Mayapada sekitar 26 tahun ini mengatakan, institusi bank biasanya dipenuhi orang dari berbagai latar belakang ilmu. Karena itu, bankir yang

ideal adalah orang yang memang bisa menggabungkan segala macam ilmu yang ada untuk mengelola bank.

Pria yang mengawali kiprahnya di BCA ini memberikan contoh sosok yang ia kagumi, Sigit Pramono, mantan Ketua Perbanas periode 2006-2016. Sebagai bankir, beliau memiliki hobi fotografi dan fotonya diakui oleh banyak khalayak. Selain itu, dirinya juga dikenal sebagai penggiat musik jazz Tanah Air.

“Sebagai seniman beliau memiliki seni meramu. Bankir harus seperti itu. Jadi, tidak hanya di bidang *finance*. Memang, hitung-hitungannya dibutuhkan karena bank berhubungan dengan uang. Tapi, ‘*kan* bisnis dan aktivitasnya tidak hanya di bidang *finance*,” tegas Hariyono, yang dulu suka menggambar ini.

# Meramu Jurus Penyelesaian Sengketa Perbankan

Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang bersengketa tentunya ingin mendapatkan penyelesaian yang adil, cepat, efisien, tepat, dan biaya yang terukur. Untuk mendapatkannya, penyelesaian sengketa perbankan bisa dituntaskan di LAPSPI.

**S**atu hal yang harus diperhitungkan pelaku perbankan dalam menjalankan bisnis dan aktivitasnya ialah risiko hukum. Sengketa dapat kapan saja muncul antara nasabah dan bank. Bila hal ini tidak dimitigasi dengan baik oleh bank akan memunculkan biaya ganti rugi dan biaya beperkara yang cukup tinggi. Sengketa yang sering muncul antara nasabah dan bank menurut catatan Assegaf Hamzah & Partner yaitu wanprestasi dalam perjanjian kredit, dana bank dikuasai oleh pihak yang tidak sah, aset tetap bank dikuasai oleh pihak lain dengan melawan hukum, dan aset milik debitor yang belum dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan.

Secara garis besar, Ariastiadi, Kepala Departemen Pengawasan Perbankan 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjelaskan ada tiga hal yang saling terkait dalam memitigasi risiko hukum di bisnis perbankan. Tiga hal tersebut ialah kelemahan aspek yuridis, yakni lemahnya perikatan antara bank dan nasabah, lalu tidak adanya peraturan perundangan, dan litigasi atau cara penyelesaian sengketa.

Lemahnya perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah bisa memicu munculnya sengketa antardua belah pihak. Banyaknya produk baru yang tidak ada landasan peraturannya juga menjadi awal sengketa bank dengan nasabah. Semua produk dan transaksi yang ditawarkan bank sebaiknya berlandaskan pada peraturan yang jelas. Lalu, bagaimana penyelesaiannya bila terjadi sengketa antara bank dan nasabah?

## Mediasi dan Arbitrase

Melihat banyaknya sengketa yang terjadi di masyarakat, Mahkamah Agung (MA) berkomitmen untuk mendorong penyelesaian masalah tadi dengan cepat, adil, komprehensif, efisien, dan tepat. Untuk mewujudkan komitmennya itu,



menurut Edy Wibowo, Asisten Senior Hakim Agung Bidang Pembinaan MA, MA telah menerbitkan peraturan yang mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Hal ini dicantumkan dalam Peraturan MA (Perma) 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MA mendorong semua masalah yang diajukan ke pengadilan diselesaikan dengan mediasi terlebih dahulu, mengingat hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan. Bahkan, MA mendorong munculnya profesional dengan keahlian tertentu yang bisa menjadi mediator. Nantinya mereka akan disertifikasi.

Cara sengketa lainnya ialah melalui lembaga arbitrase. Edy menambahkan, secara teoretis arbitrase mirip dengan pengadilan sektor perdata. Karena diakui sebagai “pengadilan swasta”, maka putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak serta bersifat final, tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali ke pengadilan.

Menurut Ahmad Fikri Assegaf, Partner/Co Founder AHP Law Firm, ada beberapa keuntungan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Keuntungannya itu ialah proses beracara yang cepat, jelas, dan fleksibel; administrasi perkara dikelola secara profesional oleh sekretariat lembaga arbitrase; keleluasaan memilih arbiter yang kompeten; keputusan final dan mengikat; proses penyelesaian perkara bersifat rahasia; biaya beperkara terukur di awal; serta putusan arbitrase dapat dieksekusi di berbagai yurisdiksi sesuai dengan New York Convention 1958.

Ahmad Fikri menambahkan, sisi positif penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ialah keahlian yang dimiliki arbiter yang lebih spesifik pada bidangnya dibandingkan dengan hakim yang sifatnya generalis. Dengan melihat latar belakang ini, arbiter lebih memahami perkara dan memutuskan dengan adil dan memberikan pertimbangan hukum yang berkualitas. Berbeda dengan hakim yang keputusannya cenderung berpandangan lebih umum dan

legalistik. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga tidak terlalu lama. “Jangka waktu maksimum atas pemeriksaan perkara dalam arbitrase adalah 180 hari, namun dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak”, ujar Ahmad Fikri.

Proses penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase seperti telah disebutkan sudah tersedia di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Himawan E. Subiantoro, Ketua LAPSPI menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap pihak yang bersengketa seluruh pihak menyatakan puas dan nyaman. Selain itu menurut mereka, proses yang dijalankan oleh LAPSPI adil, tidak memihak dan memiliki integritas yang baik. Diharapkan OJK dapat mendorong supaya pelaku perbankan dapat menggunakan lembaga ini dalam penyelesaian sengketa. Menurut Ariastiadi, sebagai regulator, OJK akan terus mengembangkan kebijakan yang dapat memperkuat keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti LAPSPI ini. ■

## Lembaga Pilihan Bank dan Nasabah

Lahirnya LAPSPI pada 28 April 2015 dirasakan sangat penting karena selama ini sengketa di industri perbankan diselesaikan melalui pengadilan akan memerlukan waktu yang lama dan relatif melelahkan bagi para pihak. Kehadiran LAPSPI dengan tiga layanan, yakni mediasi, adjukasi, dan arbitrase, diharapkan dapat memberikan kepastian jangka waktu, biaya terukur, dan proses yang baik bagi nasabah dan industri perbankan.

Dengan menjunjung tinggi nilai inti (*core values*), yakni *trust*, *integrity*, *reputable*, dan *independency (TIRI)*, LAPSPI memiliki visi menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang profesional, adil, tepercaya, dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa. Sejak berdiri hingga April 2018, LAPSPI sudah menyelesaikan 99 sengketa. Dari seluruh sengketa yang ditangani LAPSPI, sebanyak 90%-nya menghasilkan kesepakatan perdamaian dan sisanya (10%) menghasilkan sepakat sebagian dan tidak sepakat.

Menurut Fransiska Oei, Ketua Badan Pengawas LAPSPI, dalam menjalankan perannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, LAPSPI memiliki kombinasi arbiter yang memadai, yakni tiga orang mantan hakim agung, enam orang doktor atau guru besar bidang



Fransiska Oei; arbiter yang memadai

ilmu hukum bisnis perbankan, sembilan orang bankir senior, tiga orang arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan dua orang *lawyer*. Jumlah arbiter akan terus ditambah. LAPSPI juga memiliki mediator yang berlatar belakang mantan bankir atau bankir senior.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan LAPSPI berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna yang dilakukan oleh pengurus menunjukkan hasil yang memuaskan para pihak (bank dan nasabah).

Survei dilakukan pada setiap akhir proses mediasi atau arbitrase. Hal-hal yang ditanyakan kepada para pihak yang bersengketa yaitu proses pengajuan sengketa, netralitas dan integritas SDM, tingkat kenyamanan, tingkat kepercayaan, serta *endorsement* para pihak terhadap forum LAPSPI. Ke depan masih ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah LAPSPI, di antaranya sosialisasi kelembagaan harus tetap dilakukan agar layanan dan kasus-kasus yang sudah ditangani dapat dijadikan bahan perbaikan pelayanan bank anggota kepada nasabahnya.



# Masa Depan Sistem Pembayaran Indonesia

Melalui implementasi GPN, sistem pembayaran di Tanah Air akan makin efisien dan aman. Setiap transaksi akan dikelola dan diproses dalam satu gerbang pembayaran.

Platform Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) akhirnya diluncurkan pada Desember 2017. Bank Indonesia (BI) sebagai pemangku kebijakan di bidang sistem pembayaran meyakini bahwa sistem pembayaran melalui GPN akan memiliki nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Selain itu, menurut Pungky P. Wibowo, Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan GPN BI, penerapan kartu debit melalui GPN akan jauh lebih aman dan dapat mengantisipasi tindak kejahatan *skimming*. Setiap transaksi akan dikelola dan diproses dalam satu gerbang pembayaran.

“Intinya, dengan adanya GPN ini, semua transaksi di-*routing* dan diproses di dalam negeri. Jadi, *national security* kita terjaga dan *point*-nya untuk masyarakat adalah lebih murah. Ada *consumer protection* yang terjaga untuk konsumen,” ungkapnya.

Pungky juga menerangkan bahwa implementasi GPN pada kartu debit perbankan akan memberikan kemudahan bagi nasabah dengan biaya administrasi yang lebih murah sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar-*switching* dan interoperabilitas.

“Untuk konsumen jelas lebih murah. Terus, kalau misalnya saya di satu daerah tidak ada mesin *EDC* (*electronic data capture*) satu bank, maka bisa pakai yang lain atau yang berlogo GPN karena ada *interoperability* dan *interconnection swipe*. Itu sangat menguntungkan. Makanya, *economic of*



Peluncuran GPN; memiliki nilai tambah

*scale*-nya jadi sangat luas. Semua bank jadi nyaman dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Dengan diterapkannya GPN, biaya transaksi *merchant discount rate (MDR)* jadi lebih murah. Biaya *MDR* sesama bank (*on us*) menjadi sebesar 0,15%, sedangkan untuk transaksi bank yang berbeda (*off us*) menjadi 1%.

Sebagai langkah awal dari implementasi GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu *automatic teller machine (ATM)*/debit berlogo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran *merchant*/pedagang dalam negeri. Pungky menyebut, BI optimistis dapat menyelesaikan implementasi logo GPN tersebut hingga akhir April 2018.

Penerapan logo nasional merupakan identitas kedaulatan nasional di bidang sistem pembayaran ritel. Dengan demikian, prinsipal asing yang selama ini menanggung untung dari sistem

pembayaran sebelum adanya GPN akan kehilangan sebagian pendapatannya dari pasar Indonesia.

Menurut Kepala Pusat Program Transformasi BI, Onny Widjanarko, selama ini hampir setiap transaksi yang menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) pemrosesan data transaksinya (*routing*) dilakukan di luar Indonesia. “Padahal, transaksinya domestik, kartunya domestik, tapi *routing* di luar negeri,” ujarnya.

Sebagai catatan, dari 176 juta keping kartu debit yang beredar di masyarakat, 80% di antaranya menempel logo prinsipal asing, baik itu Visa, MasterCard, UnionPay, maupun JCB. *Routing* akan memanfaatkan sistem prinsipal asing yang *data center*-nya ada di luar Indonesia sehingga pemrosesan data transaksinya juga di luar Indonesia. Karena itu, ada potensi kerugian atas sebagian pajak yang tidak dipungut.

“Biaya *routing* sekitar Rp1.600 per transaksi. Mereka (prinsipal asing) kehilangan di situ. Kartu *ATM*/debit 16 juta transaksi per hari. Transaksi *off us* (kartu debit) kurang lebih 10%-20%,” ungkapnya.

Kendati demikian, prinsipal asing tetap bisa menikmati pendapatan dari penggunaan merek dan logo, juga dari biaya kerja sama dengan perbankan di Tanah Air. “Kalau mau tetap *enggak* kehilangan *fee* dari *routing*, mereka bisa bangun infrastruktur *routing* di dalam negeri. Jadi, nanti mereka buat perusahaan *switching* lokal ikut GPN,” tukasnya.

Sebagai informasi, kelancaran *routing* akan menjadi tanggung jawab GPN, yang terdiri atas lembaga standar, *switching*, dan *services*. Untuk lembaga *switching*, saat ini sudah ada PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN), dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa). Sedangkan, untuk lembaga standar, sementara akan dijalankan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Sementara, lembaga *services* akan dijalankan oleh konsorsium lembaga *services* dengan modal awal minimal Rp50 miliar, yakni PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN). Modal awal konsorsium ini ditanggung bersama oleh anggota lembaga *services*, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Artajasa, Rintis, Alto, dan JPN.

Implementasi GPN mendapat respons positif dari pelaku industri perbankan nasional. Bahkan, beberapa bank telah meluncurkan kartu *ATM*/debit berlogo GPN.

Hingga saat ini, menurut Gubernur BI periode 2013-2018, Agus D.W. Martowardojo, dari total 100 penyedia jasa sistem pembayaran, 98 di antaranya sudah mendapat persetujuan untuk menerbitkan *ATM* dan kartu debit berlogo

GPN. Dari 98 bank yang telah mendapat izin dari BI, 70 di antaranya telah menerima rekomendasi dari ASPI.

“Bagi bank, kehadiran GPN nantinya dapat memperluas akseptasi nasabah melalui kemudahan akses terhadap seluruh kanal pembayaran. GPN menjadi langkah terobosan dalam rangka menghilangkan fragmentasi layanan pembayaran retail sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sistem pembayaran yang lebih efisien melalui interkoneksi dan interoperabilitas,” ujarnya.

Salah satu respons positif datang dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang mengaku siap mengimplementasikan GPN. Menurut Maryono, Ketua Himbara, pihaknya terus mendorong para pelaku perbankan untuk segera menyiapkan pendistribusian kartu debatnya dengan logo GPN Garuda Merah.

“Untuk GPN, saya kira, Himbara sudah siap. Kami terus sesuaikan untuk perubahan kartu karena perubahan logo akan kami sesuaikan dari BI. Karena itu kartunya akan satu dan bisa dilakukan di semua bank, termasuk bank yang terhimpun dalam Himbara,” ungkapnya.

Selain itu, Maryono menjelaskan, Himbara sebelumnya juga telah mendukung dan mengimplementasikan transaksi nontunai yang dicanangkan

pemerintah. Implementasi tersebut diharapkan makin memudahkan masyarakat.

Sementara itu, Adi Setianto, Direktur Bank Tabungan Negara (BTN), mengungkapkan bahwa implementasi GPN sangat membantu dalam mendorong peningkatan transaksi nontunai. Pasalnya, saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran.

### BI Siapkan Dua Aturan

BI menginformasikan akan segera mengeluarkan revisi aturan mengenai uang elektronik dalam waktu dekat dan akan menerbitkan aturan mengenai kode respons cepat (*QR code*) untuk sistem pembayaran. Revisi aturan mengenai uang elektronik ini akan tertuang dalam peraturan BI (PBI). Penerbitan revisi PBI uang elektronik merupakan bagian dari implementasi GPN.

Revisi aturan tersebut mencakup penguatan regulasi terhadap aspek kelembagaan penerbit uang elektronik melalui batas modal minimum, penguatan aspek perlindungan konsumen, sampai dengan aspek standar keamanan transaksi. Selain itu, menjaga integritas keamanan nasional serta resiliensi keamanan nasional tanpa menghambat laju industri yang bergerak dinamis.

Sementara itu, terkait dengan *QR code*, BI sebagai otoritas sistem pembayaran melalui aturan ini akan menetapkan standardisasi nasional *QR code*. “Kami akan susun bersama *stakeholder*, perbankan, dan industri *fintech* dalam waktu dekat,” terang Agus Martowardojo. ■



**Pungky P. Wibowo;**  
*national security teraja*

# Tantangan dan Harapan pada Gubernur BI Baru

Pemimpin baru idealnya menghadirkan harapan baru, di samping melanjutkan prestasi yang sudah dicapai pendahulunya. Lantas, bagaimana harapan pelaku industri perbankan terhadap sosok Gubernur BI yang baru?

**P**ucuk pimpinan Bank Indonesia (BI) baru saja berganti. Perry Warjiyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, terpilih sebagai Gubernur BI untuk menggantikan Agus D.W. Martowardojo yang telah menjabat Gubernur BI sejak 2013.

Banyak pihak menilai sosok Perry sangat tepat menduduki posisi Gubernur BI. Sebagai pemimpin dari dalam institusi BI, Perry dianggap sangat kompeten menangani bidang moneter.

Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo, menilai, terpilihnya Perry sebagai calon tunggal Gubernur BI sudah tepat. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri ini, pengalaman dan pengetahuan makroprudensial Perry menjadi nilai tambah untuk kemajuan institusi BI dan mendorong kemajuan industri. “Beliau tahu bagaimana menjaga instrumen, menjaga stabilitas, dan menjaga daya dorong transmisi ke sektor riil,” kata Kartika.

Kartika berharap, Perry dapat meneruskan kinerja positif yang telah ditorehkan Gubernur BI sebelumnya, Agus Martowardojo. BI pada masa kepemimpinan Agus dinilai berhasil menjaga inflasi, suku bunga, dan mengembangkan sistem pembayaran nasional.

Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menambahkan, sosok Perry dikenal memiliki integritas yang kuat dalam mengemban tugasnya. Dengan sikapnya tersebut, institusi BI diharapkan makin besar. “Pak Perry itu orang BI. Dia memang keahliannya di bidang moneter dan paham mengenai makroprudensial juga memiliki pengalaman bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

Senada dengan Kartika dan Halim, Ahmad Fajar, Direktur Utama Bank Victoria, menilai Perry Warjiyo adalah seorang ahli ekonomi makro. Sebagai orang yang pernah menjabat di



Perry Warjiyo dan Agus Martowardojo; kompeten di bidang moneter

International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, menurut Fajar, pengalaman Perry tentu tak perlu diragukan lagi.

Fajar mengungkapkan, sebagai Gubernur BI yang baru, Perry dihadapkan pada beberapa tantangan. Tentu, tugas pertamanya adalah mengelola makroprudensial. Dalam hal ini Perry diharapkan mampu melanjutkan kinerja positif dan stabilitas yang telah dibangun pendahulunya.

“Yang kedua, BI harus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara *integrated*. Karena, lingkup BI selain makroprudensial ‘*kan ada payment system* serta *fintech* dan *digital banking*,” tutur anggota Bidang Humas Perbanas ini.

Menurut Fajar, kehadiran *financial technology* (*fintech*) yang diperkirakan bakal mendisrupsi perbankan, harus disikapi secara positif. Dan, BI dituntut mampu mengembangkan kemampuannya dalam mengikuti kemajuan teknologi agar pengambilan keputusan yang dilakukan BI bisa lebih cepat dan tepat.

Ketiga, Gubernur BI harus propertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia umumnya didorong oleh tingkat





**Kegiatan ekspor;** memperluas sektor ekspor

konsumsi yang tinggi. Sementara, tingkat konsumsi masyarakat belum kembali sepenuhnya. Kebijakan baru BI di bawah kepemimpinan Perry harus mampu menumbuhkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat agar dapat meningkatkan konsumsi sehingga *gross domestic product (GDP)* pun meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah uang beredar.

Keempat, mengurangi *multifinance company*, tentu saja bukan yang utama atau yang skalanya kecil (*tier 2*). Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir tak sedikit *multifinance* kecil yang bermasalah, bahkan ditutup. Faktor penyebab utamanya adalah menurunnya kemampuan konsumen untuk membayar cicilan mobil/motor.

“Harus ada kebijakan makroprudensial yang selaras dengan kebijakan mikroprudensial OJK. Kenapa yang *tier 2* ini harus ditutup? Karena, banyak yang penyaluran kreditnya menggunakan dana perbankan, rata-rata BUKU (bank umum kegiatan usaha) 2 dan 3. Jangan sampai karena banyak *multifinance* bermasalah, nantinya menyeret bank yang bersangkutan,” jelas Fajar.

Kelima, mengembangkan perbankan syariah. Perbankan syariah saat ini banyak yang melayani sektor retail dan mikro. Dan, Perry dituntut mampu mengeksekusi masyarakat ekonomi syariah yang dideklarasikan Presiden Joko Widodo.

### **Tujuh Kebijakan**

Menanggapi pertanyaan wakil rakyat dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Perry menyampaikan bahwa ia memiliki tujuh kebijakan strategis untuk memperkuat perekonomian nasional. Dengan tujuh kebijakan tersebut, Perry ingin membawa bank sentral untuk *pro-stability* dan *pro-growth* terhadap perekonomian Indonesia.

Kuncinya, lanjut Perry, BI harus lebih inovatif dan proaktif. Bank sentral juga akan berperan aktif menyampaikan pandangan tentang berbagai isu untuk mendukung kebijakan pemerintah dan otoritas terkait. Lantas, apa saja kebijakan

strategis yang akan dijalankan Perry sebagai Gubernur BI?

Pertama, memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Kedua, merelaksasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan perbankan. Ketiga, melakukan pendalaman pasar keuangan dan pembiayaan infrastruktur.

Keempat, mengembangkan sistem pembayaran untuk ekonomi digital. Kelima, mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Keenam, menguatkan koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan DPR, khususnya dari sisi kebijakan. Ketujuh, menguatkan organisasi dan sumber daya manusia (SDM).

Perry berharap, dengan tujuh kebijakan strategis tersebut, perekonomian nasional bisa tumbuh di kisaran 6% dari pertumbuhan ekonomi nasional saat ini yang

berada di kisaran 5,2%-5,3%.

Selain tujuh kebijakan tersebut, perlu ada dorongan pemerataan ekonomi nasional yang saat ini hanya fokus di beberapa daerah, seperti di pulau Jawa. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi BI untuk menciptakan pemerataan ekonomi. “Kita semua ingin ekonomi nasional yang saat ini ada di kisaran 5,2%-5,3% bisa menjadi 6% atau lebih dalam lima tahun ke depan. Kita ingin ciptakan lapangan kerja, ekonomi kerakyatan, dan pemerataan ekonomi agar tidak fokus di satu wilayah saja, tapi di semua wilayah,” ujar Perry.

Selain itu, tambah Perry, bank sentral akan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan ekspor. Salah satunya, memperluas sektor-sektor dan tidak hanya berfokus pada sektor-sektor yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia.

Hanya, pertumbuhan ekonomi saat ini memang belum meluas, lebih banyak ke sektor infrastruktur dan komoditas saja. Belum meluas ke sektor-sektor lain, seperti ke sektor pertanian, manufaktur, dan perkebunan.

Perry juga mengatakan, BI sebagai otoritas moneter akan terus memperdalam pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir dengan mempermudah penerbitan instrumen surat utang dan membangun landasan kehati-hatian bagi pelaku pasar dan industri. Di pasar valuta asing (*valas*) sendiri, jelas Perry, tahun ini volume transaksi sudah mencapai US\$6 miliar. Dalam transaksi tersebut, sebanyak 40% mencakup transaksi derivatif untuk lindung nilai, agar penarikan pendanaan lebih hati-hati.

Dengan pasar keuangan yang makin dalam, tambah Perry, pihak swasta dapat lebih mudah memperoleh utang dari instrumen di pasar. Hal tersebut juga untuk mengompensasi jika permintaan kredit dari perbankan belum terpenuhi. “Jadi, pembiayaan yang komersial dan swasta itu bisa dibiayai oleh surat utang atau *earning back asset*. Sehingga, dalam konteks ini, bisa kurangi beban fiskal dan BUMN (badan usaha milik negara) dalam pembangunan,” pungkasnya. ■

# Optimisme Bankir terhadap Perry Warjiyo

BI mempunyai nakhoda baru. Hampir tidak ada kalangan bankir yang memberikan komentar negatif terhadap pengangkatan pejabat karier BI, Perry Warjiyo, sebagai Gubernur BI.

**O**ptimistis. Itulah yang dirasakan para bankir menanggapi pengangkatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Meskipun tidak pernah meniti karier di industri keuangan, sosok Perry disambut positif

para bankir. Para bankir, termasuk pelaku usaha, menanti kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan BI terkait dengan perkembangan saat ini.

Berikut ini tanggapan beberapa bankir terkait dengan pengangkatan Perry sebagai Gubernur BI yang baru.

**Jahja Setiaatmadja**  
Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk

## Menjaga Inflasi dan Nilai Tukar



Saya kira, figur Pak Perry sudah tepat sebagai Gubernur BI. Harapan kami bisa menjaga inflasi tetap di bawah 5% serta menjaga stabilitas rupiah terhadap dolar dan mempertahankan cadangan devisa. Selain itu, diharapkan cukup netral dalam menentukan arah kebijakan suku bunga rupiah sejalan dengan arah suku bunga global.

**Kartika Wirjoatmodjo**  
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk

## Memberikan Ketenangan di Pasar



Beliau pastinya sudah tahu situasi dan kondisi di pasar sehingga diharapkan dapat memberikan ketenangan di pasar atau memberikan kebijakan yang pas dalam merespons kondisi pelemahan rupiah.

**Ferdian Timur Satyagraha**  
Direktur Keuangan Bank Jatim

## Menyokong BPD



Kami berharap Pak Perry bisa mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang mendukung kami sebagai bank daerah, antara lain kebijakan GWM dan *men-support* bank daerah selaku agen ekonomi daerah.

**Parwati Surjaudaja**  
Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk

## Menjaga Nilai Tukar Rupiah



Perry perlu berhati-hati dalam melakukan penurunan suku bunga kredit. Pasalnya, ada rencana peningkatan *Fed Fund Rate* (FFR) hingga beberapa kali dalam 21 bulan ke depan sehingga BI perlu menjaga nilai tukar rupiah yang kondusif.

**Maryono,**  
Direktur Utama Bank Tabungan Negara



## Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilisasi

Di bawah kendalinya, BI harus mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, terutama memacu pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi. Terkait dengan kenaikan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate sebesar *25 basis points (bps)* menjadi 4,50%, sosok yang telah lama berkariyer di BI ini diharapkan dapat meresponsnya melalui kebijakan moneter di luar kebijakan suku bunga acuan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS).

# Upaya Mendorong Akselerasi Perbankan

Ketidakpastian ekonomi global mesti diantisipasi dengan baik oleh pemangku kebijakan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan menggulirkan kebijakan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan.

**B**ank Indonesia pernah mengungkapkan bahwa sudah tidak ada ruang untuk menurunkan suku bunga acuan BI *7-Day Reverse Repo Rate* sebesar 4,25%, yang merupakan salah satu instrumen untuk mengakselerasi bisnis bank. Alhasil, upaya pelonggaran moneter pada masa mendatang akan lebih agresif melalui kebijakan makroprudensial.

Langkah lain mesti ditempuh BI dengan menerbitkan ketentuan penyempurnaan kebijakan moneter dan makroprudensial yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) dan PBI Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Kedua ketentuan tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang ditempuh BI sejak 2016 dan bagian dari upaya peningkatan efektivitas kebijakan makroprudensial. Dalam siaran pers terungkap bahwa penyempurnaan GWM rata-rata ditujukan untuk makin meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

Sementara itu, pengaturan RIM bertujuan mendorong fungsi intermediasi perbankan bagi sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Sedangkan, melalui pengaturan PLM, BI berharap dapat mengatasi risiko likuiditas perbankan, mengingat risiko likuiditas ini mampu mengamplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik.

“Kebijakan RIM dan PLM bagi bank konvensional telah dikenal sebelumnya melalui kebijakan GWM *loan to funding ratio (LFR)* dan GWM sekunder yang merupakan bagian dari kebijakan GWM. Sedangkan, bagi bank syariah, kebijakan RIM Syariah telah diterapkan dalam bentuk rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang juga merupakan bagian dari kebijakan GWM,” terang Arbonas Hutabarat, Direktur Komunikasi BI, melalui siaran pers tersebut.

Melihat isi PBI baru tersebut, ada beberapa substansi penyempurnaan langkah pengamanan yang diatur. Satu,



**Layanan perbankan;** melalui kebijakan makroprudensial

penambahan porsi GWM dalam rupiah rata-rata bagi BUK dari 1,5% menjadi 2% dari keseluruhan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK sebesar 6,5%. Dua, pemberlakuan GWM dalam valas rata-rata bagi BUK sebesar 2% dari keseluruhan kewajiban GWM dalam valas bagi BUK sebesar 8%.

Tiga, pemberlakuan GWM dalam rupiah rata-rata bagi BUS dan UUS sebesar 2% dari keseluruhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebesar 5%. Empat, pemberian jasa giro bagi GWM dalam rupiah BUK menjadi 0% (penihilan jasa giro). Dan, lima, penyeragaman *calculation period* (masa penghitungan), *lag period* (masa penyiapan), dan *maintenance period* (masa pemenuhan) masing-masing menjadi selama dua minggu.

Sementara itu, dalam PBI RIM dan PLM ditetapkan RIM dengan target kisaran 80%-92%, baik untuk BUK maupun BUS dan UUS. Target tersebut dibarengi dengan perluasan komponen kredit/pembiayaan yang memasukkan surat-surat berharga (SSB) yang dibeli oleh BUK, BUS, dan UUS, serta memperluas komponen simpanan dengan memasukkan SSB yang diterbitkan oleh BUS dan UUS.

Pengaturan mengenai PLM merupakan penyempurnaan dari kebijakan GWM sekunder yang dipenuhi dalam bentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat digunakan untuk operasi moneter. PLM ditetapkan dengan besaran 4% dari DPK. Dalam kondisi tertentu, surat berharga dalam perhitungan PLM dapat digunakan dalam transaksi repo kepada BI dalam operasi pasar terbuka paling banyak sebesar 2% dari DPK. ■



## Baksos Menyambut Idulfitri

**M**enjelang Idulfitri 1439 H, Perbanas Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan bakti sosial (baksos) pada 30 Mei 2018. Baksos kali ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Perbanas Sumut memilih untuk menyalurkan bantuannya ke masjid-masjid yang lokasinya berada di pinggiran Kota Medan. Masjid Al Jihad yang terletak di Jalan Pembangunan, Desa Purwodadi dan Masjid Taqwa yang berada di Jalan Setia Makmur, Sunggal, menjadi pilihan Perbanas Sumut untuk menyalurkan bingkisan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu dan menambah kegembiraan para penerima saat merayakan Idulfitri yang jatuh pada pertengahan Juni 2018. Bingkisan diberikan dalam bentuk 100 paket kebutuhan pokok dan amplop Lebaran. Dalam sambutannya, Thomas Cipta Kusuma, Ketua Perbanas Sumut, menjelaskan bahwa baksos seperti ini menjadi kegiatan rutin Perbanas Sumut saat merayakan hari besar keagamaan.

Saat menyampaikan bingkisan, Thomas Cipta Kusuma didampingi beberapa pengurus Perbanas Sumut. Mereka adalah Tonny Indra Wijaya, anggota Dewan Pengawas; Lie Cian, Bendahara; Asima Sitompol, Sekretaris; Joelina David, Ketua Bidang Sosial dan Kerohanian; Denny Muljono, Ketua Bidang Humas dan Organisasi; serta perwakilan bank anggota Perbanas Sumut, yakni Evalyna dan Jackson. ■



### DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. BANK MESTIKA DHARMA, Tbk - TAHUN 2017

(psl 6 ayat 1 huruf h, UU No.36 Tahun 2008 ttg Pajak Penghasilan)



NAMA	JUMLAH SALDO
SAHAR	2.412.129.246
SURYA BUMI MAKMUR PT	2.504.622.474
BORNEO CITRA ATLANTIK CV	3.188.371.606
PANDAPOTAN PANJAITAN IR	527.561.723
JUFRIZAL	647.794.969
VENCE IMMANUEL ZEBUA	93.862.586
WALIDIN	5.935.857
MISWANDI	177.376.868
ARIFFIN	1.223.471.999
TAN PIT TJIENG PITER ZEIN	275.000.000
MARSIA	126.253.089
RASI SIREGAR	3.042.510
KHAIRUL ANWAR RITONGA	503.624.905
JANNES SIMANJUNTAK	417.973.518
SYAHRUL HASIBUAN	528.814.635
MUHAMMAD TAUFIK RANGKUTI	319.085.988
MELLY LIE MELIE	368.823.130
TEGUH HALIM LIM	10.205.029.618
HASANUDDIN	488.047.342

NAMA	JUMLAH SALDO
IDLINSAH	2.519.589.275
IIN HERLIANI DR	500.000.000
SUYONO	487.734.826
ANTHON SYAH PUTRA	447.874.264
JOHNY TUERAH	9.784.041.061
ABD.RAHMAN HARAHAP	241.310.642
INDRA SALOMO GULTOM	444.467.043
RISKY	411.102.437
SANDY HERYANTO ANG	484.966.834
A KARIM S	797.043.662
SAHAR	1.499.138.110
HENDRA	1.628.705.108
ILHAM WAHYUDI	754.825.318
BAKRI ABDULLAH H SH	417.281.797
DANIEL	1.150.004.000
DANAU MAS TIRTA MANDIRI PT	34.262.000.000
PRATAMA INTER NUSA PT	58.291.121.957
<b>TOTAL</b>	<b>138.138.028.396</b>

## Annual Bankers Gathering 2018

Agenda tahunan perbanas “Annual Bankers Gathering” kembali digelar pada 15 Mei 2018 di Ritz-Carlton Hotel Pacific Place, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo, menyampaikan bahwa “Annual Bankers Gathering 2018” merupakan rangkaian acara dari Indonesia Banking Expo (IBEX) yang rutin diselenggarakan Perbanas sejak 2011. Pada kesempatan kali ini Perbanas mengangkat tema dialog “Prioritas dan Kebijakan Strategis untuk Mendukung Momentum Industri Perbankan dalam Pertumbuhan Kredit”.

Narasumber yang dihadirkan dalam forum dialog ini adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013-2018, Agus D.W. Martowardojo; dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Sebagai pembicara utama, Sri Mulyani mengatakan bahwa industri perbankan memiliki peran yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan. Sementara itu, Agus D.W. Martowardojo meyakinkan kalangan bankir bahwa pemerintah memiliki visi dan kerangka kebijakan ekonomi yang jelas serta diimplementasikan secara konsisten. ■





# Agar Sengketa Selesai Lebih Cepat, Efisien, dan Biaya Terukur

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa hadir di tengah kompleksnya produk dan layanan yang ditawarkan sektor keuangan. LAPSPI berharap ada persamaan persepsi antarpihak-pihak terkait dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

**M**akin beragamnya produk dan layanan yang ditawarkan perbankan ke masyarakat meningkatkan potensi sengketa antara perbankan dan nasabah. Untuk mengantisipasi kondisi itu, enam asosiasi sektor perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Perhimpunan Bank Internasional Indonesia (Perbina), dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), menandatangani *memorandum of understanding (MoU)* pada 5 Mei 2014 untuk mendirikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Pendirian lembaga ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dalam kegiatannya, LAPSPI diawasi oleh Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Melengkapi pendirian LAPSPI, dilakukan penandatanganan anggaran dasar (AD) pada 28 April 2015.

Memasuki usia yang ketiga tahun, pada 30 April 2018, LAPSPI menyelenggarakan rapat tahunan anggota di Hotel Le Meridien Jakarta. Melengkapi agenda tahunan ini diselenggarakan seminar dengan tema “Prospek Penyelesaian Sengketa Melalui LAPSPI dan Kekuatan Eksekusi Putusan Arbitrase (Arbitration Award) LAPSPI”. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut adalah Ariastiadi, Kepala Departemen Pengawasan Perbankan 2 OJK; Ahmad Fikri Assegaf, Partner/Co Founder AHP Law Firm; dan Edy Wibowo, Asisten Senior Hakim Agung Bidang Pembinaan Mahkamah Agung.

Himawan E. Subiantoro, Ketua LAPSPI, menyatakan bahwa seminar ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi yang sama antarindustri jasa keuangan dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah. Selain komisaris dan direksi bank anggota LAPSPI, seminar tersebut dihadiri lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, serta modal ventura. Ke depannya Fransiska Oei, Ketua Badan Pengawas LAPSPI, berharap partisipasi aktif komisaris dan direksi bank memanfaatkan peran LAPSPI dalam menyelesaikan konflik

dengan nasabah. “Penyelesaian sengketa melalui LAPSPI prosesnya lebih cepat, efisien, dan biayanya terukur,” ujar Fransiska.

Senada dengan Fransiska, dalam sambutannya, Sardjito, Deputy Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, menyatakan bahwa *dispute* selalu ada, termasuk di sektor perbankan. Makin banyaknya produk industri keuangan khususnya perbankan ditambah masih rendahnya literasi masyarakat tentang produk tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara bank dan nasabah. OJK berharap semuanya dapat diselesaikan melalui LAPSPI. Bahkan, OJK mendorong ada satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menaungi seluruh industri keuangan supaya lebih efisien. ■





## ABA-COFITT Sustainable Finance Seminar

Perbanas sebagai organisasi yang memayungi industri perbankan turut mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) seiring dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Paris Agreement pada 2015 lalu. Menjelang diberlakukannya peraturan pembiayaan berkelanjutan, Perbanas bersama dengan ASEAN Banking Association (ABA) menggelar seminar tentang pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) pada 4 Mei 2018 di Financial Hall, Jakarta.

Seminar ini dibuka dengan sambutan dari Paul Gwee, Sekretaris Jenderal ABA dan Ong-Ang Ai Boon, Direktur The Association of Banks in Singapore. Farid Rahman, Wakil Ketua Perbanas, dalam sambutan pembukanya mengapresiasi penyelenggaraan seminar ini. Seminar ABA-COFITT Sustainable Finance yang mengangkat tema "Managing Climate-Related Risks, Capturing Sustainable Finance Opportunities" dibagi ke dalam empat sesi dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah hingga lembaga nonprofit global. Mereka antara lain Imansyah, Senior Advisor (International Affairs) OJK; Edi Setijawan, Direktur Pembiayaan Berkelanjutan OJK; Mohammad Irfan, Direktur Manajemen Risiko OJK; Bob Tyasika Ananta, Direktur Manajemen Risiko BNI; serta Sebastian Godinot, ekonom dan Kepala Unit Pembiayaan Berkelanjutan WWF European Policy Office. ■



## FGD Analisis Permintaan Kredit

Problem pertumbuhan kredit perbankan yang melambat dalam beberapa tahun terakhir tentunya perlu dikaji secara mendalam. Perbanas bersama dengan INDEF saat ini tengah membuat sebuah kajian empiris berkaitan dengan permasalahan lambatnya pertumbuhan kredit dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Salah satu unsur dalam kajian ini ialah *focus group discussion (FGD)* dengan beberapa bank dan asosiasi industri terkait pada 9 Mei 2018 di Griya Perbanas, Jakarta. Dalam *FGD* tersebut selain perwakilan dari bank nasional, turut hadir perwakilan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPPMI), dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI). ■



## Rapat Umum Anggota Tahunan LAPSPI 2017

Pada 30 April 2018 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menggelar Rapat Umum Anggota Tahunan dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa 2017 di Hotel Le Meridien, Jakarta. Dalam rapat ini Pengurus dan Dewan Pengawas LAPSPI menyampaikan pertanggungjawaban untuk kinerja 2017. Demi memberikan gambaran tentang kinerja LAPSPI selama 2017 kepada anggota, telah diterbitkan Laporan Tahunan 2017.

Mengawali Rapat Umum Anggota Tahunan LAPSPI 2017 diselenggarakan seminar dengan tema “Sosialisasi Prospek Penyelesaian Sengketa Melalui LAPSPI dan Kekuatan Eksekusi Putusan Arbitrase LAPSPI”. Sardjito, Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam sambutannya sangat mendorong penyelesaian *dispute* melalui LAPSPI. Sardjito juga menyampaikan apresiasinya kepada LAPSPI



yang telah berperan menyelesaikan sengketa dengan baik. Dalam menjalankan kegiatannya, dari seluruh sengketa yang diajukan ke LAPSPI, 90%-nya dapat dicapai kesepakatan penuh dari para pihak. Sedangkan sisanya (10%) mencapai “kesepakatan sebagian” dan “tidak sepakat”. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut adalah Ariastiadi, Kepala Departemen Pengawasan Perbankan 2 OJK; Ahmad Fikri Assegaf, *partner/co founder* AHP Law Firm; dan Edy Wibowo, Asisten Senior Hakim Agung Bidang Pembinaan Mahkamah Agung.

Di sela-sela Rapat Umum Anggota Tahunan LAPSPI 2017 dilakukan penandatanganan kerja sama antara LAPSPI dengan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa industri asuransi. Dalam penandatanganan tersebut LAPSPI diwakili Himawan Edhy Subiantoro selaku Ketua LAPSPI dan BMAI diwakili Frans Lamury selaku Ketua BMAI. Dalam kegiatannya, LAPSPI berupaya membangun kerja sama dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa industri keuangan lainnya. ■



Pengurus  
dan Anggota Perbanas  
Mengucapkan

Selamat  
Idul Fitri 1439 H  
Mohon Maaf  
Lahir Batin



**PERBANAS**  
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL